EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KPU KOTA BAUBAU

Sarmin
Magister Administrasi Publik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Email penulis: *sarminbuton2019@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada pendaftaran pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024 dengan menitikberatkan pada aspek efisiensi, akurasi, dan transparansi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap penyelenggara pemilihan dan pihak terkait di KPU Kota Baubau. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SILON telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal. Pada aspek efisiensi, SILON mempercepat pengelolaan dokumen, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan mempermudah penyimpanan serta pengolahan data elektronik. Namun, gangguan server, keterbatasan jaringan internet, dan masih adanya verifikasi faktual secara manual membatasi efisiensi. Pada aspek akurasi, fitur validasi dan deteksi data ganda membantu meningkatkan kualitas informasi dan mengurangi kesalahan administrasi, tetapi akurasi tetap dipengaruhi oleh kualitas data yang diinput serta proses verifikasi. Pada aspek transparansi, dokumentasi digital memperkuat jejak administrasi dan akuntabilitas, tetapi akses pengawasan Bawaslu dan keterbukaan informasi kepada publik belum optimal. Faktor pendukung meliputi regulasi, infrastruktur, kompetensi operator, dukungan teknis KPU RI, dan pengalaman pengguna; sedangkan faktor penghambat meliputi gangguan sistem, keterbatasan jaringan, kualitas data dukungan, keterbatasan akses pengawasan, dan ketergantungan pada proses manual. Penelitian menyimpulkan bahwa SILON telah mendukung transformasi digital administrasi pencalonan, namun penguatan infrastruktur, integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola sistem, dan akses pengawasan diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata kunci: SILON; digital government; efektivitas; pencalonan perseorangan; Pilkada.

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the Candidate Nomination Information System (SILON) in the registration of independent candidate pairs for the 2024 Baubau Mayoral and Deputy Mayoral Election, focusing on efficiency, accuracy, and transparency as well as factors affecting implementation. The study employed a qualitative approach using a descriptive-analytical case study. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving election administrators and relevant stakeholders at the Baubau City General Election Commission. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data reduction, data display, and

conclusion drawing and verification, supported by triangulation and member checking. The findings indicate that SILON was fairly effective but had not yet reached an optimal level. In terms of efficiency, SILON accelerated document management, reduced physical documentation, and facilitated electronic data storage and processing. However, server disruptions, limited internet connectivity, and partially manual factual verification constrained efficiency. In terms of accuracy, validation and duplicate-data detection features improved information quality and reduced administrative errors, although accuracy remained dependent on the quality of user input and verification processes. In terms of transparency, digital documentation strengthened administrative traceability and accountability, but Bawaslu supervisory access and public information disclosure remained suboptimal. Supporting factors included regulations, technological infrastructure, operator competence, technical support from the national KPU, and user experience, while constraints included system disruptions, limited connectivity, supporting-data quality, restricted supervisory access, and continued reliance on manual procedures. The study concludes that SILON has supported digital transformation in candidate-registration administration, but stronger infrastructure, data integration, human-resource capacity, system governance, and supervisory access are required to improve its effectiveness.

Keywords: SILON; digital government; effectiveness; independent candidacy; local election.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam demokrasi lokal karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Dalam penyelenggaraannya, tahapan pencalonan memiliki posisi strategis karena menentukan pihak yang dapat mengikuti kompetisi berdasarkan persyaratan hukum. Pencalonan melalui jalur perseorangan memiliki kompleksitas administratif yang tinggi karena mensyaratkan dukungan masyarakat dalam jumlah dan persebaran tertentu serta memerlukan pemeriksaan administratif dan faktual.

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan tata kelola pemerintahan dari administrasi konvensional menuju digital government. OECD (2020) menempatkan teknologi digital bukan sekadar sebagai alat bantu, melainkan sebagai bagian dari transformasi cara organisasi publik bekerja, mengelola data, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Dalam penyelenggaraan pemilihan, kebutuhan tersebut semakin penting karena volume data dukungan sangat besar, waktu tahapan terbatas, dan proses harus dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk mendukung administrasi pencalonan. Dalam pencalonan perseorangan, SILON digunakan untuk pengunggahan dokumen dukungan, pengelolaan data pendukung, pemeriksaan administrasi, dan dokumentasi proses secara elektronik. Secara normatif, digitalisasi diharapkan mempercepat administrasi, mengurangi dokumen fisik, meningkatkan kualitas data, dan memperkuat akuntabilitas.

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Konteks Kota Baubau menunjukkan adanya kebutuhan evaluasi terhadap efektivitas tersebut. Berdasarkan SK KPU Kota Baubau Nomor 152 Tahun 2024, DPT tercatat 108.435 pemilih. Dalam tesis ini, angka tersebut menjadi dasar penghitungan syarat minimal dukungan sebanyak 10.844 dukungan dengan persebaran sekurang-kurangnya pada lima kecamatan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024, pasangan calon perseorangan yang mendaftar melalui SILON mengunggah 12.439 dukungan yang tersebar di delapan kecamatan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan berikutnya.

Pada pelaksanaannya ditemukan gangguan operasional SILON yang menghambat pengunggahan dokumen. KPU RI menerbitkan Surat Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 terkait perpanjangan penerimaan dokumen administrasi secara manual. Selain persoalan sistem, terdapat keterbatasan jaringan internet, kualitas data dukungan, kebutuhan pemeriksaan ulang, dan keterbatasan akses pengawasan. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara desain digitalisasi dan realitas implementasi.

Penelitian terdahulu yang dirujuk dalam tesis menunjukkan bahwa SILON membantu penataan administrasi, mempercepat verifikasi, dan memperbaiki pengelolaan data, tetapi masih menghadapi masalah jaringan, gangguan sistem, dan kapasitas pengguna. Kajian di Kabupaten Samosir, misalnya, menemukan bahwa penggunaan SILON pada pencalonan perseorangan membantu membuat proses lebih terstruktur, tetapi ketidakstabilan jaringan dan gangguan sistem memengaruhi efektivitas pelayanan. Penelitian di KPU Provinsi Jambi juga menunjukkan manfaat SILON bagi pengelolaan data dan koordinasi, dengan kendala pada kapasitas pengguna dan jaringan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kasus Kota Baubau dengan menggabungkan tiga aspek evaluasi—efisiensi, akurasi, dan transparansi—serta faktor pendukung dan penghambat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis efektivitas penggunaan SILON pada pendaftaran pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di KPU Kota Baubau ditinjau dari efisiensi, akurasi, dan transparansi; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan SILON.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Efektivitas dalam Administrasi Publik

Efektivitas dipahami sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Steers (1985) menempatkan pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan pemanfaatan sumber daya sebagai unsur penting dalam efektivitas organisasi. Dalam penelitian ini, konsep tersebut diterjemahkan secara operasional ke dalam kemampuan SILON mencapai tujuan administratif melalui efisiensi proses, akurasi informasi, dan transparansi.

2.2 Digital Government

OECD (2020) menjelaskan digital government sebagai penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dalam proses pemerintahan. Kerangka yang digunakan dalam tesis mencakup Digital by Design, Data-Driven Public Sector, Government as

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

a Platform, Open by Default, User-Driven, dan Proactiveness. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut digunakan untuk membaca apakah SILON benar-benar mengubah proses administrasi, memanfaatkan data, menyediakan keterbukaan, berorientasi pada pengguna, dan mampu merespons kebutuhan tahapan.

2.3 E-Government Success Model

DeLone dan McLean (2003) mengembangkan model keberhasilan sistem informasi melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Scott, DeLone, dan Golden (2016) mengadaptasikan kerangka tersebut dalam konteks e-government dengan menekankan keterkaitan kualitas sistem, informasi, layanan, penggunaan, kepuasan, dan manfaat. Dalam penelitian ini, efisiensi terutama dikaitkan dengan kualitas sistem; akurasi dengan kualitas informasi; sedangkan transparansi dikaitkan dengan kualitas informasi dan manfaat sistem.

2.4 Public Value Framework

Moore (1995) menempatkan penciptaan nilai publik sebagai tujuan penting organisasi publik. Twizeyimana dan Andersson (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan e-government perlu dilihat dari manfaat yang dihasilkan, termasuk efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kualitas layanan, dan kepercayaan publik. Perspektif ini digunakan untuk melihat apakah digitalisasi pencalonan menghasilkan manfaat administratif yang nyata bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan.

2.5 Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian menghubungkan penggunaan SILON sebagai instrumen digital government dengan efektivitas administrasi pencalonan. Efektivitas dianalisis melalui tiga fokus: (1) efisiensi—kemudahan pengoperasian, kecepatan, penyederhanaan alur, pengurangan pekerjaan manual; (2) akurasi—validasi data, deteksi duplikasi, kesesuaian identitas dan dokumen, serta konsistensi data; dan (3) transparansi—ketersediaan informasi, jejak digital, akses pengawasan, dan keterbukaan proses. Ketiga aspek tersebut kemudian dibaca melalui E-Government Success Model dan Public Value Framework untuk menjelaskan manfaat serta faktor yang membatasi pencapaian tujuan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses, pengalaman, kendala, dan manfaat penggunaan SILON dalam konteks pencalonan perseorangan di KPU Kota Baubau. Lokasi penelitian adalah KPU Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam tesis, penelitian lapangan direncanakan/dilaksanakan pada Juli–September 2026 dengan objek empiris tahapan pencalonan Tahun 2024.

Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansi terhadap proses SILON. Kelompok informan mencakup anggota KPU yang terlibat dalam tahapan pencalonan, staf/operator SILON, pihak pasangan calon atau tim penghubung, serta pihak terkait seperti unsur pengawasan dan petugas teknis. Pengumpulan data dilakukan hingga informasi mencapai kejenuhan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi KPU, peraturan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

perundang-undangan, pedoman teknis SILON, laporan tahapan, dan literatur ilmiah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data terarah sekaligus memberi ruang bagi informan menjelaskan pengalaman mereka.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memusatkan data pada tiga aspek efektivitas dan faktor pendukung/penghambat; penyajian dilakukan secara naratif dan tematik; sedangkan kesimpulan diverifikasi secara berulang dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu serta member check. Triangulasi sumber membandingkan keterangan dari KPU, operator, tim pasangan calon, dan pihak pengawasan. Triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan melihat konsistensi informasi, sedangkan member check digunakan untuk mengonfirmasi kesesuaian hasil wawancara dengan maksud informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Pelaksanaan Pencalonan Perseorangan

Pencalonan perseorangan pada Pilkada Kota Baubau Tahun 2024 berlangsung dalam lingkungan administrasi yang membutuhkan pengelolaan data dukungan dalam jumlah besar. Dalam tesis, DPT sebanyak 108.435 pemilih menjadi dasar penetapan syarat minimal 10.844 dukungan dengan persebaran sekurang-kurangnya di lima kecamatan. Data dukungan yang diunggah melalui SILON kemudian menjadi objek pemeriksaan administratif dan verifikasi pada tahapan berikutnya.

Penggunaan SILON mengubah sebagian proses yang sebelumnya berbasis dokumen fisik menjadi proses elektronik. Operator dapat mengelola, menyimpan, dan menelusuri data secara digital. Namun, ketika terjadi gangguan sistem dan kendala akses, mekanisme manual digunakan sebagai langkah keberlangsungan tahapan berdasarkan kebijakan KPU RI. Dengan demikian, implementasi SILON pada kasus Baubau memperlihatkan pola digitalisasi yang masih berdampingan dengan prosedur konvensional.

4.2 Efektivitas Ditinjau dari Aspek Efisiensi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SILON memberikan manfaat efisiensi yang nyata. Informan menjelaskan bahwa dibandingkan mekanisme manual, digitalisasi membuat pengelolaan dokumen dan data lebih cepat dan sederhana. Pengurangan dokumen fisik memudahkan penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan penyusunan hasil administrasi. SILON juga membantu operator menyelesaikan pekerjaan sesuai tahapan yang ditetapkan.

Namun, efisiensi tersebut tidak berlangsung tanpa gangguan. Server/aplikasi mengalami kondisi down atau slow response, terutama ketika akses pengguna meningkat. Tim pasangan calon mengalami kesulitan mengunggah dokumen pada periode kritis. Keterbatasan jaringan internet juga menjadi kendala, termasuk kasus yang kemudian tercatat dalam proses pengawasan Bawaslu Kota Baubau. Akibatnya, kebijakan perpanjangan dan penerimaan dokumen secara manual diperlukan sebagai mekanisme keberlangsungan.

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Keterlibatan PPK dalam proses verifikasi juga menunjukkan bahwa digitalisasi belum menghilangkan seluruh pekerjaan manual. Dari sudut pandang Digital Government, kondisi ini menunjukkan bahwa proses bisnis belum sepenuhnya terintegrasi secara end-to-end. Dari perspektif E-Government Success Model, persoalan tersebut berkaitan dengan reliability, availability, accessibility, dan response time sistem.

Dengan demikian, efisiensi SILON dapat dipahami sebagai efisiensi yang bersifat substantif tetapi belum menyeluruh. Sistem telah mengurangi beban administrasi tertentu dan mempercepat pekerjaan, tetapi manfaat tersebut berkurang ketika infrastruktur tidak stabil atau tahapan membutuhkan intervensi manual.

4.3 Efektivitas Ditinjau dari Aspek Akurasi

SILON memberikan kontribusi terhadap akurasi melalui validasi data, pemeriksaan identitas, dan deteksi data ganda. Dalam hasil penelitian, fitur tersebut membantu KPU mengidentifikasi dukungan yang tidak memenuhi syarat dan mengurangi kesalahan administrasi. Pada proses verifikasi awal yang dirujuk dalam tesis, terdapat 1.477 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, termasuk karena persoalan data ganda dan ketidaksesuaian data.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa akurasi sistem tidak hanya ditentukan oleh fitur aplikasi. Kualitas informasi tetap bergantung pada kualitas data yang dimasukkan oleh pengguna, kualitas dokumen yang diunggah, serta pemeriksaan lanjutan. Dokumen yang hasil pindainya kurang jelas dapat memerlukan pemeriksaan ulang. Karena itu, prinsip kualitas informasi perlu dibaca bersama kualitas input dan proses verifikasi.

Dalam perspektif DeLone dan McLean, SILON menunjukkan kontribusi pada information quality karena menyediakan validasi dan mekanisme pemeriksaan yang membantu menghasilkan informasi yang lebih terstruktur. Namun, keberhasilan informasi digital tetap mengikuti prinsip bahwa sistem tidak dapat sepenuhnya memperbaiki input yang keliru. Dalam konteks ini, akurasi merupakan hasil interaksi antara desain sistem, kualitas data, kompetensi operator, dan proses verifikasi.

Secara keseluruhan, aspek akurasi tergolong baik dalam arti SILON memiliki instrumen digital untuk meningkatkan kualitas informasi, tetapi belum optimal karena masih terdapat ketergantungan pada kualitas input dan verifikasi lanjutan.

4.4 Efektivitas Ditinjau dari Aspek Transparansi

Digitalisasi menghasilkan jejak administrasi yang lebih mudah ditelusuri dibandingkan dokumen yang tersebar secara manual. Data dan perubahan yang dikelola dalam sistem menciptakan dokumentasi elektronik yang mendukung akuntabilitas. Dari perspektif Public Value Framework, kondisi ini merupakan manfaat publik karena proses administrasi memiliki rekam jejak yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa transparansi belum optimal. Akses pengawasan Bawaslu terhadap SILON dinilai terbatas, sementara keterbukaan informasi kepada publik belum sepenuhnya tersedia. Dengan demikian, keberadaan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

data digital tidak otomatis identik dengan transparansi. Transparansi juga bergantung pada siapa yang dapat mengakses informasi, jenis informasi yang tersedia, kejelasan status proses, dan kemampuan pemangku kepentingan melakukan pengawasan.

Dalam kerangka OECD, temuan ini berhubungan dengan prinsip Open by Default dan User-Driven. Sistem digital perlu dirancang agar informasi yang memang dapat dibuka dapat diakses secara tepat oleh pihak yang berwenang dan pengguna yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data. Dalam konteks pengawasan pemilu, perluasan akses harus disesuaikan dengan kewenangan kelembagaan dan perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, transparansi SILON bersifat parsial: dokumentasi digital dan jejak administrasi telah memperkuat akuntabilitas, tetapi akses pengawasan dan keterbukaan informasi masih menjadi area yang perlu diperbaiki.

4.5 Faktor Pendukung Efektivitas

- Regulasi dan kepastian prosedur yang memberikan dasar pelaksanaan tahapan serta mekanisme penanganan gangguan.
- Infrastruktur teknologi yang memungkinkan proses administrasi dilakukan secara elektronik.
- Kompetensi operator dan pengalaman pengguna dalam mengoperasikan SILON.
- Dukungan teknis KPU RI dalam penanganan gangguan dan keberlangsungan tahapan.
- Koordinasi antarpelaksana, termasuk dukungan PPK ketika beban verifikasi membutuhkan sumber daya tambahan.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas teknologi publik merupakan hasil interaksi teknologi, organisasi, sumber daya manusia, regulasi, dan koordinasi. Sistem yang baik tetap membutuhkan kapasitas kelembagaan untuk memastikan penggunaannya berlangsung konsisten.

4.6 Faktor Penghambat Efektivitas

- Gangguan server, slow response, atau kondisi aplikasi down pada periode akses tinggi.
- Keterbatasan jaringan internet yang memengaruhi kemampuan pengguna mengakses dan mengunggah dokumen.
- Kualitas data dukungan dan kualitas hasil pindai dokumen yang masih memerlukan pemeriksaan ulang.
- Keterbatasan akses pengawasan Bawaslu terhadap sistem.
- Masih adanya proses verifikasi manual sehingga digitalisasi belum sepenuhnya end-to-end.

Kasus kendala jaringan yang dialami tim pasangan calon dan tercatat dalam sengketa proses di Bawaslu Kota Baubau menunjukkan bahwa faktor eksternal di tingkat pengguna dapat berinteraksi dengan faktor teknis sistem. Karena itu, peningkatan efektivitas tidak cukup hanya dengan memperbaiki aplikasi, tetapi juga memerlukan dukungan konektivitas, desain prosedur kontinjensi, dan koordinasi antarlembaga.

4.7 Analisis Integratif Berdasarkan Digital Government

Pada prinsip Digital by Design, SILON menunjukkan perubahan nyata dari administrasi berbasis dokumen fisik menuju pengelolaan digital. Namun, keberadaan prosedur manual ketika sistem terganggu menunjukkan bahwa

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

transformasi belum sepenuhnya menggantikan proses konvensional.

Pada prinsip Data-Driven Public Sector, SILON memperkuat pengelolaan data dukungan melalui validasi dan deteksi duplikasi. Akan tetapi, kualitas data tetap dipengaruhi kualitas input dan verifikasi. Pada prinsip Government as a Platform, manfaat integrasi terlihat dari pemusatan proses dalam sistem, tetapi kebutuhan verifikasi di luar sistem menunjukkan interoperabilitas dan integrasi proses masih perlu diperkuat.

Pada prinsip Open by Default, jejak digital mendukung akuntabilitas, tetapi keterbatasan akses pengawasan dan informasi publik menunjukkan keterbukaan belum optimal. Pada prinsip User-Driven, pengalaman operator dan tim pasangan calon menunjukkan pentingnya kemudahan akses dan stabilitas sistem. Sementara itu, Proactiveness menuntut kemampuan sistem dan penyelenggara mengantisipasi lonjakan akses serta menyediakan mekanisme kontinjensi sebelum gangguan menghambat tahapan.

4.8 Analisis Berdasarkan E-Government Success Model

Temuan penelitian menunjukkan hubungan antara kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, dan manfaat. Kualitas sistem terlihat dari kemudahan pengoperasian dan kemampuan digitalisasi administrasi, tetapi terganggu oleh server dan jaringan. Kualitas informasi meningkat melalui validasi dan deteksi duplikasi, tetapi bergantung pada input. Kualitas layanan tampak melalui dukungan teknis dan kebijakan penanganan gangguan. Manfaat bersih terlihat dalam penghematan pekerjaan manual, percepatan administrasi, peningkatan keterlacakan, dan penguatan akuntabilitas.

Model ini membantu menjelaskan mengapa SILON dapat menghasilkan manfaat sekaligus masih memiliki keterbatasan. Manfaat tidak semata-mata berasal dari fitur aplikasi, tetapi dari kualitas sistem, kualitas data, layanan dukungan, dan kondisi penggunaan. Karena itu, peningkatan efektivitas harus dilakukan secara sistemik.

4.9 Analisis Berdasarkan Public Value Framework

SILON menciptakan nilai publik terutama melalui efisiensi pelayanan, dokumentasi yang dapat ditelusuri, kualitas informasi yang lebih terstruktur, dan dukungan terhadap akuntabilitas. Proses digital mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempermudah pencarian serta pengolahan data. Jejak digital juga memberi dasar untuk penelusuran ketika terjadi perbedaan hasil.

Namun, nilai publik belum optimal ketika akses sistem terganggu, jaringan terbatas, dan pengawasan digital tidak memperoleh akses yang memadai. Karena itu, public value pada SILON harus dipahami sebagai hasil yang muncul ketika teknologi, pelayanan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tata kelola berjalan secara bersama.

4.10 Sintesis Temuan

Aspek	Temuan utama	Kendala	Implikasi
Efisiensi	Administrasi lebih cepat; dokumen fisik berkurang; data lebih	Server, jaringan, verifikasi manual.	Efisiensi meningkat tetapi belum end-to-end.

	mudah dikelola.		
Akurasi	Validasi dan deteksi data ganda membantu pemeriksaan.	Kualitas input, dokumen kurang jelas, verifikasi lanjutan.	Kualitas informasi meningkat namun tetap bergantung pada input dan verifikasi.
Transparansi	Jejak digital memperkuat dokumentasi dan akuntabilitas.	Akses pengawasan dan informasi publik terbatas.	Transparansi administratif meningkat tetapi belum optimal.
Faktor	Regulasi, operator, infrastruktur, dukungan teknis, koordinasi.	Gangguan, konektivitas, kualitas data, akses pengawasan, proses manual.	Efektivitas bersifat sosio-teknis, bukan hanya teknis.

5. KESIMPULAN

Pertama, penggunaan SILON pada pendaftaran pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di KPU Kota Baubau telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal. Pada aspek efisiensi, SILON mempercepat pengelolaan administrasi, mengurangi dokumen fisik, dan mempermudah pengolahan data elektronik. Keterbatasan muncul akibat gangguan sistem, jaringan internet, dan proses verifikasi faktual yang masih memerlukan mekanisme manual.

Kedua, pada aspek akurasi, SILON membantu meningkatkan kualitas data melalui validasi dan deteksi data ganda. Namun, akurasi tetap dipengaruhi oleh kualitas data yang diinput, kualitas dokumen, kompetensi pengguna, dan verifikasi lanjutan. Dengan demikian, sistem digital tidak berdiri sendiri dalam menentukan kualitas informasi.

Ketiga, pada aspek transparansi, SILON menghasilkan dokumentasi dan jejak digital yang memperkuat akuntabilitas administrasi. Akan tetapi, transparansi belum optimal karena akses pengawasan Bawaslu dan keterbukaan informasi kepada publik masih terbatas.

Keempat, efektivitas SILON dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi regulasi, infrastruktur, kompetensi operator, dukungan teknis KPU RI, pengalaman pengguna, dan koordinasi antarpelaksana. Faktor penghambat meliputi gangguan server, keterbatasan jaringan, kualitas data dukungan, keterbatasan akses pengawasan, dan ketergantungan pada proses manual.

Secara konseptual, temuan memperlihatkan bahwa efektivitas SILON merupakan fenomena sosio-teknis. Teknologi menghasilkan manfaat ketika ditopang infrastruktur yang andal, kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, layanan teknis, serta tata kelola keterbukaan dan pengawasan.

6. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

- Penguatan kapasitas dan keandalan server serta bandwidth, terutama untuk

menghadapi lonjakan akses pada batas akhir tahapan.

- Penyempurnaan integrasi data kependudukan dan mekanisme validasi untuk meningkatkan kualitas informasi.
- Peningkatan kompetensi operator melalui pelatihan berkala dan simulasi kondisi gangguan.
- Penyediaan mekanisme kontinjensi yang jelas untuk menjaga kesinambungan tahapan ketika sistem mengalami gangguan.
- Penguatan akses pengawasan bagi Bawaslu sesuai kewenangan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
- Pengembangan fitur yang mengurangi ketergantungan pada verifikasi manual sehingga proses dapat semakin terintegrasi.
- Evaluasi berkala berbasis pengalaman pengguna untuk memastikan desain sistem sesuai kebutuhan penyelenggara dan peserta.

Rekomendasi tersebut diarahkan bukan untuk menghapus mekanisme manual secara mutlak, melainkan untuk memastikan bahwa mekanisme digital menjadi proses utama yang andal, sedangkan prosedur manual berfungsi sebagai kontinjensi yang terukur ketika kondisi luar biasa terjadi.

7. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada satu kasus, yaitu penggunaan SILON pada pencalonan perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di KPU Kota Baubau. Oleh karena itu, temuan terutama menggambarkan konteks kelembagaan, teknologi, dan pengalaman pengguna pada kasus tersebut. Penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik kepada seluruh daerah. Studi lanjutan dapat membandingkan beberapa KPU daerah atau mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan pengukuran kuantitatif kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

DAFTAR PUSTAKA

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Frensiska, T. (2019). Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah sebagai wujud demokrasi lokal. Jurnal Konstitusi, 16(3), 512–531.

Gobles Silalahi, C., Zulakarnain, I., & Fauzan, I. (2024). Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Kepala Daerah Calon Perseorangan Tahun 2020 di Kabupaten Samosir. Perspektif, 13(2), 614–623.

Handoko, A., Wijaya, R., & Lestari, S. (2024). Pendekatan kualitatif dalam penelitian kebijakan publik dan sistem informasi pemerintahan. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 9(1), 55–68.

Husnullail, & Jailani, M. S. (2024). Teknik triangulasi dalam menjamin keabsahan data penelitian kualitatif. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 5(1), 21–34.

Irawan, E., Pasaribu, I., & Ahmad, Z. H. (2025). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Proses Pendukung Pendaftaran Peserta Pemilu 2024 di KPU Provinsi Jambi. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 5(4).

Janowski, T. (2015). Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 221–236.

Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE.

OECD. (2020). The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government. OECD Publishing.

Pedrosa, et al. (2022). Digital public service effectiveness [rujukan sebagaimana dicantumkan dalam tesis].

Scott, M., DeLone, W. H., & Golden, W. (2016). Measuring e-Government Success: A Public Value Approach. European Journal of Information Systems.

Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Erlangga.

Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The Public Value of E-Government: A Literature Review. Government Information Quarterly, 36(2), 167–178.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425–478.

Yulia, S. (2022). Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pelaksanaan Pemilu 2024. Jurnal Tata Kelola Pemilu, 3(2), 45–61.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Panduan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau. (2024). Laporan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tentang perpanjangan penerimaan dokumen administrasi pasangan calon perseorangan.